

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUANKORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS
ONLINE (*Gender Online*)**

**Oleh
ADLENE RAMADHINA R
NIM. 180574201091**

Abstrak

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kejahatan kekerasan seksual yang semakin berkembang menjadi KBGO di Kota Tanjungpinang, yang sering kali tidak terdeteksi dengan baik oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya pemerintah dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban KBGO serta mengidentifikasi hambatan yang menghambat efektivitas peran pemerintah dalam hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan pemahaman teori yang relevan. Data utama dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan DP3APM dan UPTD PPA, tetapi penelitian juga mengacu pada data primer lainnya serta bahan hukum dan studi kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tindak pidana KBGO yang belum terdeteksi dengan baik oleh pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban belum terlaksana secara maksimal. Wawancara dengan DP3APM dan UPTD PPA juga mengindikasikan bahwa korban KBGO yang melaporkan kejadian tersebut masih sedikit. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam penegakan hukum terkait KBGO masih kurang efektif, baik dari sisi UPTD PPA maupun DP3APM di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan kewenangan UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan bagi korban tindak pidana KBGO, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online, Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum

**LEGAL PROTECTION OF WOMEN VICTIMS OF
ONLINE-BASED SEXUAL VIOLENCE
(Gender Online)**

**By
ADLENE RAMADHINA R
NIM. 180574201091**

Abstract

The central issue addressed in this research is the growing prevalence of sexual violence, which has evolved into a form known as KBGO (Sexual Violence in the Online Sphere), particularly in the city of Tanjungpinang, often going undetected by the government. The aim of this research is to examine the government's efforts in law enforcement and legal protection for KBGO victims and to identify the obstacles hindering the effectiveness of the government's role in this regard. The research methodology employed is a normative approach, focusing on the analysis of legislation and relevant theoretical understandings. The primary data for this study were obtained through interviews with DP3APM (Women Empowerment and Child Protection Office) and UPTD PPA (Integrated Service Center for Women and Children), complemented by other primary data sources and relevant legal materials and literature. The research findings reveal that there are still instances of KBGO crimes that remain inadequately detected by the Tanjungpinang government, resulting in suboptimal law enforcement efforts and legal protection for victims. Interviews with DP3APM and UPTD PPA indicate that KBGO victims reporting such incidents are still relatively few. Based on the research findings, it can be concluded that the government's role in KBGO-related law enforcement is not yet fully effective, both from the perspective of UPTD PPA and DP3APM in Tanjungpinang. Consequently, further efforts are needed to optimize the authority of UPTD PPA in Tanjungpinang in providing services to KBGO crime victims, both by the Central Government and the Local Government of Tanjungpinang.

Keywords: KBGO, Law Enforcement, Sexual Violence